



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggai Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 24 Januari 2023/Periodik - 2022)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : BADAN PUSAT STATISTIK (BPS)
UNIT KERJA : BADAN PUSAT STATISTIK PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

I. DATA PRIBADI

1. Nama : WAHYUDIN
2. Jabatan : KEPALA
3. NHK : 144970

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN

Rp. 2.050.000.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 120 m2/110 m2 di KAB / KOTA KOTA MATARAM , HASIL SENDIRI Rp. 600.000.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 183 m2/164 m2 di KAB / KOTA KOTA MATARAM , HASIL SENDIRI Rp. 700.000.000
3. Tanah Seluas 300 m2 di KAB / KOTA KOTA MATARAM , HASIL SENDIRI Rp. 750.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN

Rp. 413.000.000

1. MOTOR, HONDA SCOPY SCOPY Tahun 2019, HASIL SENDIRI Rp. 15.000.000
2. MOBIL, HONDA BRIO SATYA 1.2 E CVT CKD Tahun 2020, HASIL SENDIRI Rp. 135.000.000
3. MOBIL, TOYOTA INNOVA Tahun 2019, HASIL SENDIRI Rp. 240.000.000
4. MOTOR, HONDA SCOPY Tahun 2022, HASIL SENDIRI Rp. 23.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA

Rp. 157.509.000

D. SURAT BERHARGA

Rp. ----

E. KAS DAN SETARA KAS

Rp. 133.672.375

F. HARTA LAINNYA

Rp. ----

Sub Total

Rp. 2.754.181.375

III. HUTANG

Rp. 48.452.166

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)

Rp. 2.705.729.209



1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.